

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air salah satu sumber daya alam yang esensial bagi makhluk hidup terutama manusia, tanpa air proses kehidupan tidak akan berlangsung. Sehingga keberadaan air untuk keberlangsungan hidup menjadi prioritas utama. Pada umumnya ketersediaan air di Indonesia mencapai 694 milyar meter kubik pertahun, jumlah yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan, namun pada kenyataannya baru 23 persen yang sudah termanfaatkan, dimana hanya 20 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga dan 80 persen digunakan untuk memenuhi kehidupan irigasi (Samekto & Winata, 2010).

Dewasa ini ketersediaan air di Indonesia semakin tidak kondusif sehingga mempercepat kelangkaan pada air, yang ditandai dengan kerusakan pada lingkungan maupun kerusakan pada hutan yang luas lahannya semakin kritis. Kondisi ini menimbulkan dampak kekhawatiran bagi masyarakat dimana kurang meratanya sistem lingkungan secara keseluruhan untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang maupun kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum yaitu air yang bersih dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitas yang memenuhi syarat kesehatan air minum apabila digunakan saat dikonsumsi. Dalam menjalankan hidup di masa depan, manusia sangat bergantung pada air untuk keperluan memasak, minum dan keperluan lainnya. Maka dari itu perlu diperhatikan

kualitas air yang digunakan tidak mengandung kuman, tidak beracun, dan tidak menimbulkan bau, jika hal ini dibiarkan saja akan berdampak pada kesehatan manusia (Menteri Kesehatan RI, 2010).

Pada tahun 2012, secara global 29 persen kematian pada balita disebabkan oleh diare dan pneumonia dan lebih dua juta anak meninggal setiap tahunnya, hampir 90 persen kasus kematian terjadi pada masyarakat miskin pedesaan dan tertinggal berdampak pada penggunaan air minum yang tidak aman dan sanitasi masih kurang (Unicef, 2012). Oleh karena itu untuk melanjutkan ketersediaan air bersih dan menurunkan angka kesehatan dilingkungan masyarakat akibat dari dampak prasarana yang buruk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berinovasi dibidang kesehatan.

Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat disektor pembangunan yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah, pembangunan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk bisa hidup sehat agar mewujudkan derajat yang optimal. Hal ini disebabkan karena disamping kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dirasa masih kurang.

Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang berwenang berkomitmen dalam mencapai *Millenium Development Goals* disektor air minum dan sanitasi (*WSS-MDG*) telah berhasil menurunkan separuh dari jumlah penduduk yang belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi pada tahun 2015, Pemerintah Pusat merencanakan Program Nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) sebagai program peyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

(Pamsimas). Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan dan peri urban agar bisa mengakses pelayanan air minum dan sanitasi (Pamsimas, 2016).

Berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan air minum dan sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah, untuk mendukung kapasitas dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Program Pamsimas III kelanjutan dari program sebelumnya yang sudah terlaksana sejak tahun 2008 sampai saat ini, sebagai instrumen pelaksanaan kedua agenda nasional dalam rangka meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu: 1) air bersih untuk rakyat dan, 2) sanitasi total berbasis masyarakat (Pamsimas, 2016).

Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan air minum yang belum mencapai 100%. Penempatan kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Daerah, sedangkan Pemilihan Desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Target dari desa sasaran Program Pamsimas kurang lebih 3.401 desa. Adapun tempat pelaksanaan Program Pamsimas di DI.Yogyakarta tersebut diantaranya yaitu:

Tabel 1.1

Daerah Sasaran Program Pamsimas tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Nama Desa/Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Alokasi Dana BLM(Rp)
1.	Kulon Progo	Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh. Desa Garongan, Kecamatan Panjatan. Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh. Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan. Desa Giripuwo, Kecamatan Girimulyo. Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap. Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih. Desa Pindoworejo, Kecamatan Girimulyo. Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh. Desa sidomulyo, Kecamatan Pengasih.	10	2.450.000.000
2.	Bantul	Desa Argosari, Kecamatan Sedayu. Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan. Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek. Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan.	4	980.000.000
3.	Gunung Kidul	Desa Bleberan, Kecamatan Playen. Desa Getas, Kecamatan Playen. Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari. Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan. Desa Mulo, Kecamatan Wonosari. Desa Mulusan, Kecamatan Wonosari. Desa Salam, Kecamatan Patuk. Desa Sodo, Kecamatan Paliyan. Desa Wareng, Kecamatan Wonosari.	9	2.123.945.200

Sumber: SK Desa No. 35 Tentang Penetapan Desa tahun 2017

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sebanyak 349 kabupaten di Indonesia, Kabupaten Bantul salah satu daerah yang memperoleh bantuan penyediaan air minum dan sanitasi, ini dikarena memiliki permasalahan terhadap air bersih, yang difokuskan pada Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek.

Secara garis besar permasalahan utama dalam pengelolaan kegiatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi yang aman dan layak bagi penduduk desa serta belum tersedianya lembaga yang khusus dalam menangani pengelolaan air minum dan sanitasi di Desa Tirtomulyo. Dari hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya untuk meminimalisir dari permasalahan lingkungan yang kurang sehat dan menurunkan angka penderita penyakit yang di timbulkan oleh air layak diberikan pelayanan ini kepada Desa Tirtomulyo (RKM, 2016).

Tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan air minum dan sanitasi yang sehat yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari evaluasi kebijakan. Terdapat beberapa pendapat terkait evaluasi kebijakan antara lain menurut Ziervogel (2008) evaluasi adalah sebuah kegiatan penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan saat proyek selesai dilaksanakan ataupun saat sedang berjalan. evaluasi biasanya di dahului oleh suatu penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran, dimana pengukuran diartikan sebagai suatu kegiatan guna membandingkan pengamatan dengan sebuah kriteria penilaian (*assessment*) yang ada Griffin & Nix (dalam Widoyoko, 2005).

Berikutnya evaluasi menurut Winarno (2013) bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah siklus kebijakan. Perbandingan antara standar, fakta dan analisa hasilnya. Dari beberapa teori evaluasi oleh para ahli diatas, penulis akan menggunakan teori evaluasi menurut Ziervogel (2008). Dimana evaluasi berfokus pada penilaian obyektif saat proyek selesai dilaksanakan, hasil evaluasi kebijakan pelayanan kemandirian masyarakat dalam membangun organisasi masyarakat (KKM) oleh Program Pamsimas di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

Meskipun banyak program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk bersaing di kancah lokal, nasional maupun internasional. Sebagai bentuk upaya mengembangkan dan memajukan daerah, maka pemerintah juga berkolaborasi atau bekerjasama dengan pihak swasta untuk ketersediaan dana sebagai penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat untuk mendukung proses berjalannya program yang diberikan untuk desa dapat maju, mandiri dan modern (Rahmad, 2017).

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengkontekskan permasalahan utama pada proses pelaksanaan kegiatan Program Pamsimas di Desa Tirtomulyo yang belum optimal. Hal ini kemudian dikaitkan dengan konteks *governance* karena menyangkut mengenai keterlibatan aktor pemerintah (*state*) dengan stakeholder. *Collaborative Governance* diperlukan untuk melihat bagaimana multi stakeholder, yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pihak swasta dalam melakukan kolaborasi Program Pamsimas di Desa Tirtomulyo

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Dengan melalui evaluasi pengelolaan Program Pamsimas pada tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah untuk melihat “Bagaimana evaluasi Program Pamsimas di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tahun 2017, juga melampirkan data terkait keterlibatan stake holder dan evaluasi kemandirian KKM”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses evaluasi Program Pamsimas dan kemandirian KKM di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tahun 2017, juga melampirkan data terkait keterlibatan stake holder dalam meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat turut serta memberikan perkembangan untuk ilmu dan kajian evaluasi program dalam melaksanakan pengelolaan air bersih dan sanitasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran dan masukan bagi Desa Tirtomulyo sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan Program Pamsimas.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang juga pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain guna mengemukakan pula perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan guna menghindari kesamaan. Berikut hasil penelitian yang berhasil peneliti temukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian dari Andito, dkk (2013) tentang “evaluasi implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobongan”. Berdasarkan penelitiannya implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi (Pamsimas), memiliki sasaran-sasaran yang hendak dicapai yaitu mengenai cakupan perubahan perilaku dimana didalamnya mencakup akses air bersih, jamban sehat, stop buang air besar sembarangan dan membiasakan cuci tangan pakai sabun (CTPS), kemudian penguatan kelembagaan khususnya ditingkat desa. Selanjutnya juga terdapat beberapa aspek pendukung dan penghambat dari implementasi program pamsimas itu sendiri, yaitu:
 - a. Akses terhadap air bersih, program pamsimas terbukti membantu masyarakat kecamatan karangrayung dalam memenuhi akses kebutuhan air mereka. Masyarakat Kecamatan Karangrayung yang semula menggunakan sumber air dari alam seperti sendang, sungai dan sumur dali mulai menggunakan pamsimas sebagai sumber air mereka, walaupun tidak semuanya mengakses sumber air dari pamsimas.

- b. Kebiasaan buang air besar sembarangan dan akses jamban sehat, kebiasaan buang air besar di Kecamatan Karangrayung menurun seiring dengan membaiknya akses air bersih serta pemicuan dari fasilitator pamsimas yang membutuhkan kesadaran mereka agar tidak lagi kebiasaan buang air besar sembarangan. Akses jamban sehat di Kecamatan Karangrayung mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit, hal ini diakibatkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik.
- c. Perilaku hidup bersih dan sehat, kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS) hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, mereka hanya menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai air tanpa menggunakan sabun. Sarana pendukung kebiasaan CTPS di Kecamatan Karangrayung masih kurang, khususnya untuk sekolah-sekolah tingkat desa.
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa, ditingkat desa dibentuk organisasi pengelola pamsimas melalui musyawarah desa dengan dihadiri tokoh masyarakat, kepala desa, pamong desa dan didampingi oleh fasilitator. Organisasi pengelola pamsimas mempunyai tugas mengelola, memantau, merawat, baik sarana fisik, finansial dan pelaksanaan pamsimas, hingga pelayanan terhadap masyarakat, instalasi dan penentuan besaran biaya bulanan masyarakat yang mengakses pamsimas. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program pamsimas berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek sasaran yang kurang tercapai, perlu adanya perbaikan dan

menyempurnakan agar implementasi program pamsimas yang ada lebih berjalan maksimal sesuai dengan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

2. Hasil Penelitian dari Sitranata & Santoso (2016) tentang “Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Tembalang”. Berdasarkan penelitian pelaksanaan kinerja pamsimas di Kecamatan Tembalang dinilai masih banyak kekurangan, empat dari enam kriteria yang digunakan masih belum bisa dikatakan berhasil yang mengakibatkan kinerja Pamsimas di Kecamatan Tembalang dikatakan rendah dan belum optimal. Dilihat dari tiga faktor yaitu, sumber daya manusia yang masih kurang baik segi kuantitas maupun kualitas, sumber daya anggaran sangat terbatas mengingat anggaran yang diberikan dari Kota Semarang juga kecil. Faktor kelembagaan juga masih belum baik disebabkan banyaknya pihak yang terkait dengan pamsimas lembaga tersebut belum berfungsi sepenuhnya. dan faktor komunikasi yang diterapkan sudah cukup baik. Upaya untuk mengatasi kurangnya kecukupan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk memahami buku pedoman dan petunjuk teknis supaya akurat sebagai pertimbangan evaluasi selanjutnya.

3. Hasil penelitian dari Faza (2014) tentang “Evaluasi Keberhasilan Program penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) di Kabupaten Tegal”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Evaluasi Keberhasilan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten Tegal merupakan suatu program untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang di daerah membutuhkan sarana air bersih dan sanitasi yang dikelola dan dibuat secara swadaya baik dari pemerintah maupun masyarakat dan pihak swasta. Faktor evaluasi program ini menyangkut organisasi pelaksana program dan penerima manfaat sedangkan faktor upaya perbaikan keberhasilan program menyangkut proses pengambilan keputusan organisasi, persyaratan tugas dan wewenang, kompetensi dari staf pelaksana, ekspresi tuntutan. Hasil penelitian evaluasi keberhasilan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten Tegal ini masih terdapat kendala pada beberapa aspek seperti organisasi pelaksana dengan penerima manfaat, harus adanya jalinan komunikasi antar pengelola baik pemerintah maupun masyarakat agar lebih baik lagi, kesadaran masyarakat akan air bersih masih kurang.

4. Hasil penelitian dari Jenawi (2017) tentang “Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bintan (studi Kampung Jeropet, Desa Teluk Bakau dan Desa Malang Rapat) berdasarkan penelitian yang dilakukan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di tiga lokasi belum dapat dikatakan baik karena setelah dievaluasi berdasarkan teori evaluasi CIPP menunjukkan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya PNPM Mandiri dari ketiga lokasi hanya satu lokasi yang dilaksanakan cukup baik yakni Kampung Jeropet kelurahan Kawal. Hal ini dapat terlihat dari hasil temuan yang telah dievaluasi menunjukkan bahwa bantuan pinjaman dana bergulir di sana dapat membantu memodali

usaha masyarakat setempat sedangkan di Desa Teluk Bakau pelaksanaan PNPM Mandiri tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan masyarakat kurang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan penggunaan dana harus dipakai untuk membangun apa. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Malang Rapat juga kurang sesuai dengan kebutuhan sekalipun ada juga program yang dapat meringankan beban masyarakat yakni PNPM Mandiri yang diperuntukkan sebagai pemenuhan tempat tinggal layak huni. Masyarakat yang menerima dampak di masing-masing lokasi, seperti di lokasi pertama yakni Kampung Jeropet merasakan dampak positif dari program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di sana khususnya PNPM Mandiri Perdesaan dana bergulir yang membantu masyarakat memulai usahanya. Selain itu masyarakat di Kampung Jeropet juga merasakan dampak negatif yakni angsuran pengembalian pinjaman yang dirasa cukup berat dan membebani masyarakat. Masyarakat di Desa Teluk Bakau merasakan kebingungan dengan pengadaan taman bacaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan utama mereka sedangkan di Desa Malang Rapat masyarakatnya merasa cukup terbantu dengan adanya PNPM Mandiri Perkim. Program pemberdayaan yang dilaksanakan di tiga lokasi banyak yang tidak sesuai dengan prinsip - prinsip dasar PNPM Mandiri yaitu bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi kepada masyarakat miskin, prioritas, kolaborasi, partisipasi, demokratis dan lain sebagainya. Pelaksanaan PNPM Mandiri yang tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar PNPM Mandiri contohnya tidak memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat seperti di Desa Teluk Bakau yang menjadi kebutuhan utama masyarakat ialah pengadaan air bersih bukan pembangunan taman bacaan. Pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada rakyat harus mendengarkan usulan dan pengambilan keputusan dirembukkan bersama-sama sebagaimana prinsip dasar PNPM Mandiri yang salah satunya demokratis yaitu pengambilan keputusan harus berdasarkan mufakat dan musyawarah yang telah dilakukan. Temuan lainnya berupa tertundanya penyelesaian jalan aspal yang menjadi infrastruktur Perdesaan. Padahal masyarakat telah memberikan tanahnya kepada pemerintah jika ingin dibangun jalan aspal karena jalan merupakan akses pembangunan pembuka yang utama untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Jika melihat dari hasil evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri di tiga lokasi di Kabupaten Bintan yang telah ada, penulis merekomendasikan beberapa pemikiran penulis yaitu sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bintan menyesuaikan program pemberdayaan dengan karakteristik wilayah yang dimiliki di masing-masing daerah sehingga pelaksanaan nantinya akan benar-benar dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan pemanfaatan potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Bintan harus lebih memperhatikan keadaan ataupun kondisi masyarakat yang seperti ini agar program bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Terdapat beberapa macam definisi dari evaluasi yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli. Menurut Fathoni (2016), menyatakan secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Asal katanya adalah *value* yang berarti nilai, jadi evaluasi adalah sebuah kegiatan untuk menentukan nilai dari sesuatu kegiatan. Sedangkan menurut Rinda Hedwig (2006) mengungkapkan bahwa proses yang dilakukan secara konsisten untuk menjaga proses pengawasan (monitoring) dan evaluasi secara internal yaitu pada proses yang memuat kegiatan audit, penilaian dan evaluasi.

Menurut Ziervogel (2008), evaluasi adalah sebuah kegiatan penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan saat proyek selesai dilaksanakan ataupun saat sedang berjalan. Dengan tujuan melihat relevansi dari pemenuhan tujuan, pengembangan efisiensi, efektifitas hingga dampak yang berkelanjutan. Kegiatan evaluasi ini memberikan informasi yang kredibel atau dapat dipercaya sebagai proses penentuan nilai. Penilaian ini menggunakan standar yang tepat untuk pemeriksaan kinerja suatu program atau kegiatan.

Evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas, selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang

sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai (Purwanto, 2002).

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Evaluasi menurut Kaihatu bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dapat menentukan nilai maupun seberapa penting sebuah kegiatan, program, atau suatu program (Kaihatu, 2006). Evaluasi adalah sebuah proses penilaian yang seobyektif dan sistematis mungkin terkait dengan sebuah tekanan yang direncanakan atau tengah berlangsung yang telah diselesaikan. Hal-hal yang semestinya dievaluasi yaitu berupa program, proyek, kebijakan, sektor, organisasi, tematik, serta bantuan Negara.

Menurut Yunanda pengertian evaluasi adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya direncanakan untuk dapat menentukan keadaan sebuah objek dengan menggunakan instrumen serta hasilnya dapat dibandingkan dengan suatu patokan untuk kemudian menjadi kesimpulan (Yunanda dalam Sapitri, 2014). Sementara menurut Griffin & Nix menyatakan bahwa evaluasi biasanya didahului oleh suatu penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran, dimana pengukuran diartikan sebagai suatu kegiatan guna membandingkan pengamatan dengan sebuah kriteria penilaian (*assessment*)

yang ada (Griffin & Nix dalam Widoyoko, 2005). Kriteria penilaian yang dimaksud yaitu kegiatan untuk menafsirkan serta menggambarkan hasil dari suatu pengukuran, sedangkan evaluasi digunakan guna menentukan suatu nilai serta implikasi dari perilaku.

Menurut Afriani (2017) evaluasi mempunyai pengertian yang berhubungan atau masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan ataupun program. Serta dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha dalam menganalisis hasil kebijakan mengenai arti satuan nilainya.

Menurut Arikunto mengatakan bahwa evaluasi adalah proses penggambaran, mencari serta memberikan informasi yang sangat berguna untuk pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan tersebut (Arikunto, 2010). Maka evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian terhadap pentingnya suatu kegiatan ataupun kebijakan sehingga kita dapat membandingkan apakah kegiatan atau kebijakan yang dibuat itu sudah efektif ataupun efisien. Evaluasi juga memberikan gambaran mengenai informasi yang telah diperoleh sehingga keputusan akhir dapat ditentukan. Winarno (2013) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah siklus kebijakan. Secara umum dapat diartikan sebagai tahap penilaian dari hasil kinerja pegawai atau karyawan suatu organisasi. Sejalan dengan ini proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Evaluasi perbandingan yang

dilakukan atas tujuan yang hendak dicapai untuk penyelesaian masalah dengan hasil atau kejadian yang sebenarnya terjadi.

Menurut Dunn evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kinerja dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003).

Jadi dapat disimpulkan evaluasi adalah sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menilai dan menentukan sebuah ukuran suatu program kegiatan telah tepat sasaran atau telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum.

1.6.2 Prinsip-prinsip Evaluasi

Prinsip-prinsip evaluasi, menurut Fattah dalam Samuel (2008), mengemukakan ada 6 prinsip, yaitu:

1. Prinsip berkelanjutan, yang artinya dilakukan secara berlanjut
2. Prinsip menyeluruh, yang artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus di evaluasi.
3. Prinsip bersifat obyektif, yang artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.
4. Prinsip valid, yang artinya mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.
5. Prinsip pengguna yang kritis.
6. Prinsip yang memperhatikan kegunaan atau manfaat.

b. Tujuan Evaluasi

Menurut (Kusek & Rist, 2004) mengemukakan beberapa tujuan dari evaluasi diantaranya:

1. Membantu pembuatan keputusan alokasi sumber daya
2. Membantu memikirkan kembali sebuah penyebab dari permasalahan
3. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan darurat
4. Memberi support kepada pengambil keputusan untuk bersaing dan memberikan cara-cara alternative terbaik
5. Memberi dukungan terhadap inovasi dan reformasi sektor publik
6. Membangun sebuah konsensus pada akar masalah dan cara menanggapinya.

c. Tipe Evaluasi

Menurut (Kusek & Rist, 2004) ada beberapa tipe evaluasi yaitu:

1. *Performance Logic Chain Assessment*

Model evaluasi seperti ini digunakan untuk menentukan kekuatan dari program, kebijakan dan proyek.

2. *Evaluasi Pre implementation assessment*

Strategi evaluasi Pre-implementation assessment merujuk pada tiga standar khusus yang harus diartikulasikan secara jelas sebelum seorang pemimpin bergerak ke fase implementasi.

3. *Process Implementation Evaluation*

Fokus dari evaluasi pada proses implementasi adalah pada sebuah detail dari implementasi yang dilaksanakannya. Apa saja yang sudah diimplementasikan atau belum diimplementasikan dari sebuah rencana.

4. *Rapid Appraisal*

Metode *Rapid Appraisal* bisa dikarakteristikan menjadi sebuah metode kompleks dengan berbagai pendekatan metode evaluasi yang menggunakan koleksi data berupa angka-angka. Metode ini membutuhkan informasi yang cepat dalam jangka waktu yang sesuai tapi relative murah anggaran yang digunakan.

5. *Case Study*

Metode ini biasanya digunakan ketika seorang pemimpin membutuhkan sebuah informasi mendalam untuk memahami secara jelas apa yang terjadi terhadap sebuah kebijakan, program, atau proyek.

6. *Impact Evaluation*

Metode ini mencoba untuk menentukan porsi dari dampak sebuah dokumen, penyebab intervensi, dan kemungkinan apa yang datang dari kegiatan atau kondisi lainnya.

7. *Meta-Evaluation*

Menetapkan sebuah kriteria dan prosedur-prosedur untuk sebuah jalur sistematis bagi evaluasi-evaluasi yang ada untuk memandang kedepan demi menyimpulkan sebuah trend dan menghasilkan sebuah kepercayaan diri dalam penemuan studi yang lain.

d. Kreteria Evaluasi

Kriteria evaluasi harus memuat nilai-nilai evaluasi menurut Hamilton & Ziervogel (2008) sebagai berikut:

1. Standar tinggi etika profesional

Nilai ini lebih dikenal dengan kode etik umum yang harus diataati oleh setiap Pegawai Negeri dari suatu instansi pemerintah. Penerapan nilainya dimulai dari input hingga output dari suatu program yang dijalankan dan di dalamnya berisikan evaluasi etika, pengelolaan konflik kepentingan, etika tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan perilaku yang tidak etis, pelatihan etika, penyaringan sebelum kerja, sehingga nantinya dapat terlihat perilaku professional dan etis dalam kinerja personil dari Pegawai Negeri tersebut.

2. Efisiensi

Nilai ini diterapkan untuk mengolah sumberdaya agar berdaya guna dan tepat, terutama dalam hal biaya program. Adapun dalam penilaiannya berisikan tentang hasil perencanaan, pelaksanaan, pencapaian, pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan.

3. Efektifitas

Nilai ini digunakan untuk melihat seberapa baik *output* dan *outcome* dari tujuan program yang dicapai dan seberapa sesuainya *output* dengan hasil yang diinginkan. Ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria adapun kriteria tersebut yaitu, input, proses produksi, output dan produktivitas.

4. Berorientasi Pada Pembangunan

Dalam prakteknya, suatu program harus berorientasi dalam pembangunan hal ini berarti bahwa setiap hari kegiatan administrasi publik harus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung dan masyarakat tidak mampu.

5. Pelayanan Tidak Memihak

Pelayanan atau program yang diberikan haruslah menjunjung persamaan hak dan keadilan, pemerintahan harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dan menikmati proses pelayanan kegiatan, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.

6. Bertanggung jawab

Merupakan nilai kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk bertanggungjawab dalam keberhasilan serta kegagalan sebuah program yang dilaksanakan.

7. Akuntabilitas

Nilai ini merupakan aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan sebagai penanggungjawab dari semua tindakan yang dilakukan dalam program dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Indikator akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas program.

8. Transparansi

Pelayanan program pemerintahan yang baik akan bersifat terbuka dan akurat terhadap masyarakatnya. Nilai juga membuka peluang bagi masyarakat

untuk memberikan atau mengusulkan sebuah pendapat atau kritikan terhadap pemerintah yang dirasa kurang terbuka atau transparan. Transparansi dapat diukur melalui indikator sebagai berikut, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

9. Dilaksanakan oleh SDM yang baik dan mampu

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dipilih dengan baik akan memudahkan program yang dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi manusia tersebut.

10. Administrasi publik dapat mewakili kalangan luas

Meskipun terdapat kepentingan yang berbeda dalam tujuan pelayanan program akan tetapi intinya tetap berorientasi pada perwakilan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

1.6.3 Program

a. Pengertian Program

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli terkait dengan pengertian program. Diantaranya, Menurut Zainudin (2014), program adalah sebuah rancangan atau rencana pelaksanaan kegiatan dengan asas serta usaha dalam melaksanakan kegiatan atau program. Sedangkan menurut Wijayanti (2016) Program adalah sebuah unsur utama yang harus ada untuk menciptakan suatu kegiatan, yang dijelaskan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Tujuan dari kegiatan yang akan dicapai
2. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan

3. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan

4. Strategi pelaksanaan

Melalui adanya program dalam setiap rencana kegiatan akan lebih tersusun dan memudahkan dalam pengoprasiaannya. Hal ini didukung dengan pengertian program yang dijelaskan sebagai berikut, program adalah kumpulan dari beberapa kegiatan atau program yang telah di susun untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selaras setara secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan (Wijayanti,2016).

Menurut Siagian (2006) Program adalah suatu bentuk rencana yang akan dilaksanakan sebagai salah satu unit ataupun kumpulan dari kegiatan yang menjadi bentuk realisasi atau pengimplemntasian yang berasal dari kebijakan langsung yang memiliki kesinambungan yang terjadi didalam suatu organisasi yang melibatkan beberapa atau sekelompok orang. Dari penjelasan itu dapat ditekankan bahwa program mempunyai 3 unsur penting yaitu sebagai berikut:

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi bersama berkesinambungan.
3. Terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa program ialah sekumpulan bentuk rencana atau rancangan yang akan dilakukan sebagai satu kesatuan atau unit dari serangkaian kegiatan yang menjadi bentuk realisasi atau implementasi dari sebuah kebijakan langsung yang mempunyai kesinambungan dalam sebuah organisasi yang melibatkan beberapa atau sekelompok orang.

1.6.4 Program Pamsimas

Berdasarkan Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Ruang lingkup dari Program Pamsimas mencakup lima komponen program, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa.
2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;

3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;
4. Hibah Insentif dan,
5. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 membutuhkan upaya bersama dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Pamsimas menjadi program air minum dan sanitasi yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menjadi program bersama dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan pada tahun 2019.

Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2008-2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.

Program Pamsimas III yang dilaksanakan pada tahun 2016-2019, kelanjutan dari Program Pamsimas I dan II (tahun 2008-2015) yang merupakan instrumen pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu dengan (1) 100%-100% akses air minum dan sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat

berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 di sektor air minum dan sanitasi, melalui perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dari penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas terkait permasalahan yang hendak diteliti. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menentukan atau menilai suatu program yang telah berjalan sesuai dengan sasaran yang diinginkan atau belum.

b. Program

Program adalah suatu bentuk rencana yang akan dilaksanakan sebagai salah satu unit ataupun kumpulan dari kegiatan yang menjadi bentuk realisasi atau pengimplementasian yang berasal dari kebijakan langsung yang memiliki kesinambungan yang terjadi didalam suatu organisasi yang melibatkan beberapa atau sekelompok orang.

c. Pamsimas

Pamsimas adalah suatu program yang mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas pengertian sesuai dengan definisi konsep yang ada. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi Program Pamsimaair di Desa Tirtomulyo terhadap pengelolaan air minum dan sanitasi tahun 2017. Definisi operasional yang digunakan oleh penulis merujuk pada teori Nanang Fatah (dalam Samuel: 2008) terkait prinsip-prinsip dalam evaluasi yang menggunakan beberapa indikator untuk menganalisis proses evaluasi. Adapun indikator yang digunakan adalah:

1. Prinsip berkelanjutan.
2. Prinsip yang menyeluruh.
3. Prinsip yang bersifat obyektif.
4. Prinsip yang valid.
5. Prinsip pengguna yang kritis.
6. Prinsip yang mempertahankan kegunaan atau manfaat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian studi kasus, yaitu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terinci, mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang suatu peristiwa (Rahardjo, 2017). Kemudian untuk metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu

penelitian yang berisikan data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 2005). Jenis dan metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara deskriptif bagaimana proses evaluasi Program Pamsimas Desa Tirtomulyo terhadap kebijakan pengelolaan air minum dan sanitasi di tahun 2017.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

1.9.3 Unit analisis

Penelitian ini mengkaji tentang proses evaluasi yang dilakukan di Desa Tirtomulyo terhadap pengelolaan air minum dan sanitasi di tahun 2017, maka unit analisis data dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pengambilan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan bersumber langsung dari subjek utama. Data primer pada penelitian ini didapatkan hasil wawancara, observasi. Sementara itu data sekunder adalah dokumen pendukung berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Dawson, 2010). Berikut adalah tabel jenis data yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1.1

Data Primer

No.	Nama Data Primer
1.	Hasil wawancara Ketua Koordinator KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
2.	Hasil wawancara Ketua UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
3.	Hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
4.	Hasil pelaksanaan PAMSIMAS Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
5.	Hasil wawancara dengan Ketua SATLAK Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
6.	Hasil wawancara dengan Ketua/Staff Seksi Air Minum dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
7.	Hasil observasi di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

Sumber: Data diolah

Tabel 1.2

Data Sekunder

No.	Nama Data Sekunder
1.	Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3.	Pedoman Umum Program PAMSIMAS Tahun 2016
4.	Buku Rencana Kerja Masyarakat Tahun 2016
5.	Laporan Pertanggung Jawaban Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2016
6.	Surat Keputusan Desa No. 35 tahun 2017 Tentang Penempatan Desa
7.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 492 tahun 2010

Sumber: Data diolah

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder, karena kedua data tersebut dapat saling melengkapi. Penambahan data pada primer dan sekunder dilakukan seiring dengan data yang didapatkan saat pelaksanaan penelitian berlangsung.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Penjelasan dari teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab dan bertatap muka antara narasumber dengan pewawancara (Dawson, 2010). Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, artinya penulis membuat jadwal wawancara dan daftar pertanyaan wawancara sebagai pedoman akan tetapi pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tidak harus sama persis dengan pedoman sehingga tidak menutup kemungkinan ada variasi atau improvisasi pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan informasi atau data yang ingin didapatkan oleh pewawancara. Berikut tahapan wawancara subyek wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Daftar Narasumber

No	Nama/ Jabatan	Jumlah	Instansi
1.	Bapak Erwin Prasmanta. ST. MT. Kepala Bidang Cipta Karya bagian Air Minum dan Sanitasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	1	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Bapak Suhadi Kepala Koordinator KKM Tirto Sembada Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul	1	Pemerintah Desa Tirtomulyo
3.	Bapak Sagiyo Staf Unit Pengaduan Masyarakat	1	Organisasi Masyarakat Desa KKM
4.	Masyarakat Desa Tirtomulyo	1	Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek

Sumber: Data diolah

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan panca indera untuk mengamati suatu hal yang terjadi. Penggunaan teknik observasi juga dapat mengeksplorasi dengan memberikan gambaran jelas tentang suatu permasalahan dan petunjuk pemecahannya (Sugiyono, 2005).

Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipatif dimana penulis terlibat langsung dengan obyek penelitian di lapangan. Observasi dilakukan dengan pengamatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah data historis atau dokumen yang lalu untuk menunjang data penelitian (Sugiyono, 2005). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, berita, website resmi pamsimas dan perundang-undangan yang

terkait dengan topik peneliti. Dokumentasi tersebut dijadikan sebagai pelengkap dalam penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses pengorganisasian atau mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar (Sugiyono, 2005). Pada penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat menafsirkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori (Sugiyono, 2005). Lalu untuk teknik analisa datanya menggunakan teknik analisa data primer dan sekunder karena data yang dibutuhkan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden penelitian dan kajian penelitian sebelumnya.

Analisis data menurut Moleong dalam Sugiyono (2005) menyangkut tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasannya:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kesamaan data yang diperoleh, sehingga wawancara, pengelompokan data dilakukan dengan membuat ringkasan data yang diperoleh di lapangan dan dokumentasi penelitian terkait.

b. Penyajian data

Penyajian data didefinisikan sebagai pengorganisasian, penggabungan informasi yang berupa penyajian penyajian data yang sudah diringkas dan

disajikan dalam bentuk laporan sistematis sehingga mempermudah penelitian untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2005).

c. Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah terkumpul atau tersusun dan dicocokkan kembali pada reduksi data dan display data, agar kesimpulan yang didapat bisa disepakati sebagai laporan tertulis yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.